

INTISARI

Konsep *New Public Management* (NPM) merubah pandangan birokrasi tradisional menjadi pandangan yang mengadopsi pengalaman dan pengetahuan sektor privat dalam menjalankan reformasi manajemen publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan organisasi, serta meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas. Salah satu doktrin utama NPM adalah standar pengukuran kinerja yang eksplisit dan jelas, hal ini sering disebut juga dengan indikator kinerja. Penelitian ini menganalisis penyusunan indikator kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman dengan alat analisis berupa cetak biru kinerja, menggunakan dua model yaitu model logika cetak biru kinerja dan analisis empat kuadran.

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan dan menganalisis hubungan logis antar indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Sleman, menjelaskan indikator kinerja sebagai ukuran kesuksesan dalam mencapai sasaran kinerja dengan pendekatan cetak biru kinerja, dan menganalisis faktor yang dapat mendukung dan menghambat implementasi evaluasi program berbasis kinerja. Sumber data yang digunakan dari wawancara dan dokumen perencanaan serta pelaporan Bappeda Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sleman pada tahun 2012 dan 2014 sudah menunjukkan konsistensi informasi dari dokumen perencanaan hingga dokumen pelaporan. Namun pada Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sleman pada tahun 2013 masih belum menunjukkan konsistensi. Sebagian besar indikator kinerja *output* Bappeda Kabupaten Sleman masih berupa kualitas usaha yaitu sebesar 68 persen pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Selain itu, 79% indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sleman berada dalam kategori upaya belum berbasis dampak.

Kata Kunci: Indikator Kinerja, New Public Management, Model Logika, Performance Blueprint, Analisis Empat Kuadran

ABSTRACT

The concept of New Public Management (NPM) change view of the traditional bureaucracy become view that adopt the experience and knowledge of private sector in running public management reform. Its purpose is to improve the efficiency and effectiveness of public services and organizations, as well as to improve service and accountability. One of the NPM's main doctrines is an explicit and clear standard measurement of performance, often referred as performance indicators. This study analyzes the development of indicators of performance indicator in Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman with analysis tools Performance Blueprint, with two models; Logic Model Performance Blueprint and Four Quadrant Analysis.

These studies aims to demonstrate and analyze the logical relationship between performance indicators in Bappeda Sleman's performance accountability system, describes the performance indicators as a measure of success in achieving performance targets with the approach of Performance Blueprint, and analyze the factors that can support and impede the implementation of program evaluation based on performance.

The results showed that the Bappeda Sleman's performance indicators in 2012 and 2014 have demonstrated the consistency of information on planning documents to reporting document. Nevertheless, Bappeda Sleman's performance indicators in 2013 has not shown consistency. Sixty eight percent performance indicators of output in BAPPEDA Sleman in 2012, 2013, and 2014 are still in Quality of Effort. In addition, 79% of BAPPEDA Sleman's performances indicators are in the categories of effort and have not been based on effect.

Keywords: Performance Indicators, New Public Management, Logic Model, Performance Blueprint, Four Quadrant Analysis